



PARADIGMA PENGEMBANGAN MODEL PEMBANGUNAN NASIONAL DI INDONESIA
Development Paradigm of The National Development Model in Indonesia

¹Mahadiansar, ²Khairul Ikhsan, ³I Gede Eko Putra Sri Sentanu^c & ⁴Asparyana

^{1,3}Universitas Brawijaya & ^{2,4}Universitas Maritim Raja Ali Haji

e-mail : ¹mahadiansar@student.ub.ac.id, ²ikhsanrambemacom123@gmail.com,

³sentanu@ub.ac.id & ³riyanaaspa@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article history:

Dikirim Tgl. : 25 Maret 2020

Revisi Pertama Tgl. : 22 Mei 2020

Diterima Tgl. : 09 Juni 2020

Kata Kunci :

Paradigma, Pembangunan

Nasional, Model

Pembangunan, Indonesia

Keywords :

Paradigm, Development,

Contribution, development model.

Pemerataan perkembangan pembangunan sebagai upaya merealisasikan amanah pembukaan UU 1945 dalam konteks pembangunan nasional. Indikator suksesnya pembangunan didasari model perkembangan pembangunan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada kesenjangan sosial akibat pengembangan pembangunan yang tidak tepat sasaran. Penelitian ini memberikan titik fokus sebagai bentuk alternatif dari paradigma terhadap model-model pembangunan didaerah sebagai bentuk kontribusi pembangunan nasional. Peneliti melakukan eksplorasi terhadap model-model pembangunan pada teori-teori terdahulu dengan pendekatan studi kepustakaan yang relevan menggunakan teknik analisis data yaitu analisis kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya ada 4 (empat) fokus alternatif sebagai kontribusi pembangunan nasional pada pengembangan model pembangunan. Pertama, model pembangunan nasional berorientasi pertumbuhan yang mengarah kepada peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia. Kedua, model pembangunan kebutuhan dasar yang berfokus kepada kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sebagai bentuk pengetasan kemiskinan serta karakteristik yang harus diterapkan dalam model pembangunan kebutuhan dasar. Ketiga model pembangunan berbasis masyarakat yang artinya pengawasan oleh masyarakat serta proses pembangunan dikehidupan masyarakat yang ada dilingkungannya yang mana setiap individu manusia dan kelompok harus meningkatkan kualitas dalam proses pembangunan. Model terakhir, atau keempat yaitu model pembangunan kedaerahan yang bertujuan untuk merealisasikan program bersifat otonomi daerah yang berkaitan dengan hak serta kewenangan daerah sesuai kebutuhannya.

Abstract

Equitable development as an effort to realize the mandate of the preamble of the 1945 Constitution in the context of national development. Indicators of successful development are based on a development model to overcome problems that occur social disparities due to inaccurate development goals. This research focuses on alternative forms of paradigm towards regional development models as a form of national development contribution. Researchers explored development models in previous theories with the relevant literature study approach using library data analysis techniques. The results showed that there are four alternative focus of national development as a contribution to the development model that is first is a growth-oriented model that leads to the improvement of the people's economy through the development of human resources. Second is a basic needs development model that focuses on the basic daily needs of the community as a form of poverty alleviation that is oriented towards empowerment. The third is People centered model which means the supervision by the public as well as the development process in the life of existing community environment. Fourth is the regional development model that aims to realize regional autonomy programs related to regional rights and authorities according to their respective needs.

A. PENDAHULUAN

Secara f umum pembangunan merupakan proses upaya yang sistematis saling berkesinambungan sehingga memperoleh sebuah

kondisi yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi bagi masyarakat. Dengan perkataan lain proses pembangunan merupakan proses memanusiakan manusia. Di

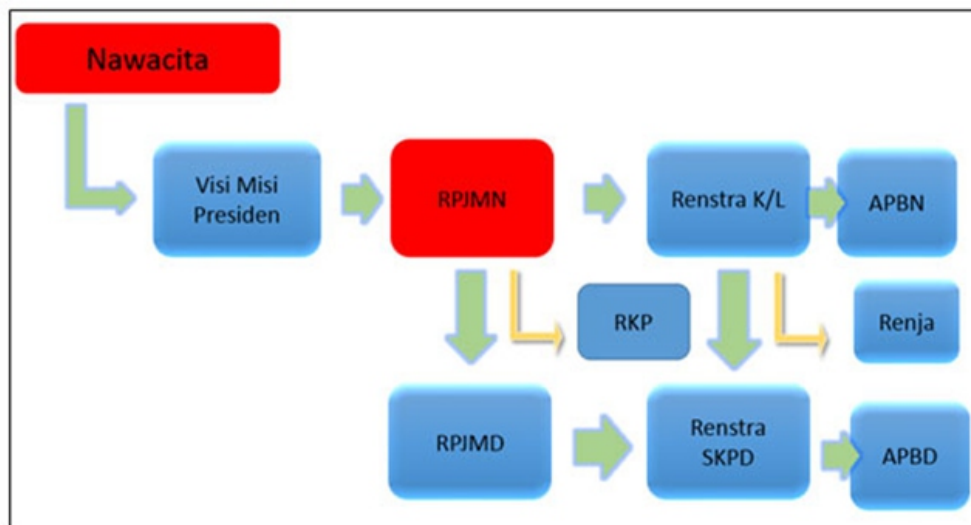
Indonesia dan di berbagai Negara berkembang, istilah pembangunan sering kali lebih berkonotasi fisik artinya sering kali melakukan kegiatan-kegiatan membangun yang bersifat fisik, bahkan sering kali secara lebih sempit di artikan sebagai membangun infrastruktur atau fasilitas fisik. Pengertian dari pemilihan alternatif yang sah dalam definisi pembangunan di atas diartikan bahwasanya upaya pencapaian aspirasi tersebut dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku atau dalam tatanan kelembagaan atau budaya yang dapat diterima.

Indonesia memiliki kekayaan atas sumber daya manusia dan sumber daya alam beserta isinya, kekayaan alam yang dimaksud serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia ini tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Kekayaan itu patut untuk dijaga agar terjadi keharmonisan di antara kedua sumber dayanya. Dengan perkembangan

zaman yang mendorong munculnya globalisasi ini, tidak melulu memberikan dampak negatif bagi Indonesia. Perlu diketahui, dengan adanya globalisasi di Indonesia dapat mendorong Indonesia dalam hal pembangunan di berbagai aspek dan bidang guna mensejahterakan penduduk yang tinggal di Indonesia.

Pada abad sekarang ini terjadi perubahan-perubahan yang sangat mencolok di seluruh dunia. Indonesia sebagaimana Negara-negara berkembang lainnya. Pada saat ini dengan sengaja mengadakan dan merencanakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat melalui usaha pembangunan. Perubahan-perubahan itu tidak berasal dari alam, tetapi dari manusia dan masyarakat. Perubahan-perubahan ini tidak hanya terjadi pada individu-individu, melainkan pada seluruh masyarakat.

Gambar 1.
 Kebijakan Pembangunan Nasional 2015-2020 Berdasarkan Nawacita Presiden RI.



Sumber : -----(Chaniago, 2014,:23)
 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, n.d.)

Selanjutnya telah banyak pengalaman pemerintah dalam membangun daerah yang berhasil mengidentifikasi baik itu dari segi kegagalan maupun keberhasilan pada pengembangan wilayah menjadi pelajaran sebagai mengembangkan strategi pengembangan daerah yang berpotensi menjadi fokus pembangunan nasional. Perencanaan kebijakan pembangunan ditujukan untuk mengupayakan keserasian dan keseimbangan pembangunan harus sesuai dengan potensinya dan memanfaatkan potensi tersebut

secara efektif dan efisien.

Menurut Solow (1956:91), teori pembangunan itu sendiri lahir pertama kali pada aliran Neo klasik di tahun 1950-an yang mentransfer pemahaman baru perihal faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara. Teori neoklasik disebut juga sebagai model pertumbuhan Solow. Teori ini mempercayai bahwa hal dasar yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan standar hidup (*standard of living*) dari suatu negara adalah tabungan dan penanaman modal

negara sehingga diharapkan akan memberikan pengaruh positif bagi pendapatan dan modal suatu negara dalam jangka panjang.

Tabungan dan penanaman modal di suatu negara berpengaruh positif terhadap kemampuan produksi suatu negara. Berdasarkan teori solow ini, modal pembangunan terdiri atas 4 item yaitu: modal fisik, modal manusia, sumber daya alam, dan modal sosial. Lebih lanjut lagi secara teoritis, faktor-faktor yang dapat memengaruhi produktivitas dari suatu negara adalah faktor yang dipergunakan untuk menghasilkan barang atau produk secara fisik seperti tanah, bangunan, mesin, elektronik dan jenis peralatan lainnya. Modal fisik itu kemudian dimanfaatkan dengan berbagai cara untuk mendukung produktivitas. Berikutnya faktor yang mempengaruhi produktivitas suatu negara adalah sumber daya alam. Sumber daya alam sendiri merupakan bahan baku dalam kegiatan produksi. Sementara teknologi merupakan pemahaman dalam memproduksi barang dan jasa untuk menghasilkan produk yang lebih baik.

Pemanfaatan faktor pembangunan dengan penggunaan modal fisik secara jangka panjang ini akan mengalami depresiasi atau penyusutan karena harga karena modal fisik akan mengalami penyusutan. Begitu pula untuk penggunaan Sumber Daya Alam, dalam jangka panjang akan mengakibatkan sumber daya tersebut semakin lama semakin berkurang atau bahkan dapat habis. Berbeda halnya dengan penggunaan modal manusia dalam jangka panjang tidak mengalami penyusutan ataupun habis. Tentunya kita ketahui bersama pengelolaan modal manusia di setiap negara berbeda-beda, contoh kecilnya adalah pengelolaan modal manusia di beberapa negara berkembang akan pastinya berbeda dengan negara maju dimana masyarakatnya sudah meninggalkan tradisi masyarakat kuno dan lebih mengikuti perkembangan zaman.

Perkembangan pembangunan dalam abad 21, telah dipengaruhi oleh ideologi Globalisasi dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pemahaman globalisasi kontemporer yang bertumpu pada 3 pilar pembangunan bidang ekonomi (deregulasi, privatisasi dan stabilitas keuangan) terasa sangat penting, mendesak dan relevan untuk memotivasi setiap negara untuk dapat menemukan model pembangunan yang cocok dengan nilai-nilai yang dianut oleh

masyarakat global di satu sisi, namun di sisi lain, pengaruh pemahaman tersebut tidak boleh meninggalkan atau bahkan menghapuskan sama sekali nilai-nilai lokal yang memberikan pengaruh signifikan bagi pembangunan saat ini (Atmasasmita, 2012:2).

Saat ini revolusi pada industri 4.0 ini pula, peran modal manusia perlu ditingkatkan untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi di suatu negara karena manusia diwajibkan harus melek pada teknologi, kemampuan negara untuk mengembangkan sumber daya manusia, khususnya dalam menyediakan tenaga kerja yang terampil diberbagai bidang menjadi kunci untuk kesuksesan kebijakan ekonomi di setiap negara. Modal manusia dan pendidikan merupakan dua faktor penting dan keduanya saling memiliki keterkaitan satu sama lain dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Modal manusia itu sendiri adalah suatu sumber daya yang menggabungkan pengetahuan, pelatihan dan keterampilan dengan kualitas pendidikan dan pertumbuhan ekonomi ' (Islam et al., 2016). Peningkatan *output* suatu negara tidak hanya diukur dengan modal, sumber daya, dan kemajuan teknologi tetapi juga oleh pertumbuhan produktivitas. Produktivitas merupakan rasio antara keluaran dibandingkan dengan *output*.

Produktivitas adalah total barang dan jasa yang diproduksi oleh pekerja pada setiap jam kerja. Pertumbuhan ekonomi berbeda-beda disetiap negara. Negara berkembang seperti Indonesia sendiri berada di peringkat keempat dengan jumlah penduduk terpadat di dunia yang mencapai 264 juta jiwa (World Bank ,2018 :27)hal ini tentu pemerintah harus dapat mengoptimalkan modal manusia yang terdapat di wilayahnya untuk meningkatkan produktivitas pembangunan nasional. Sebagai salah satu negara dengan populasi terpadat di dunia maka Indonesia memiliki keuntungan dalam jumlah tenaga kerja. World Bank mendefinisikan tingkat partisipasi angkatan kerja sebagai persentase antara tenaga kerja yang bekerja terhadap total populasi penduduk yang berumur antara 15 tahun 64 tahun. Berdasarkan kajian dari World Bank pada tahun 2018, tingkat partisipasi tenaga kerja di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.

Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2015, yaitu dari 67,11% menjadi 65,82%. atau turun

sebesar 1,29% dari tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang mengakibatkan penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2015. Salah satunya ialah terjadi perubahan tenaga kerja yang bekerja di sektor formal ke informal. Meskipun pada tahun 2010 tingkat partisipasi angkatan kerja berada pada posisi tertinggi, yaitu sebesar 67,91 atau naik sebesar 0,31% dari tahun sebelumnya tetap saja perhatian pemerintah pada pengoptimalan angkatan kerja ini rasanya perlu untuk ditingkatkan kembali standar kompetensinya.

Menurut Soepono (1999:4) Isu-isu kebijakan pembangunan, khususnya pada angkatan kerja merupakan tipe kebijakan penerapan khusus. Banyak permasalahan sosial yang terkait dengan potensi daerah sehingga kebijakan untuk mengatasi masalah ini hendaknya ditangani oleh ekonomika spasial seperti ekonomi regional maupun ekonomi perkotaan dari suatu daerah. Isu-isu kebijakan ini menjadi suatu hal yang fundamental dalam serta mempelajari pembangunan ekonomi regional maupun perkotaan dari suatu daerah, karena dimensi spasial tidak akan dapat melepaskan dirinya dari sebuah isu-isu kebijakan publik. Solusi terhadap isu-isu kebijakan tersebut umumnya ditujukan pada tempat-tempat tertentu karena berkaitan dengan pembangunan di suatu daerah saja. Tentunya para *stakeholder* kebijakan daerah hendak mengambil suatu keputusan baru mengenai atau ingin membenahi daerah wewenangnya, maka agar efektif keputusan kebijakan itu diambil setelah membahas landasan dari ekonomi mikro dari pembangunan daerahnya. Pembahasan landasan mikro itu sendiri berarti membahas perilaku para pelaku bisnis di daerah itu yang menjelaskan mengapa mereka dulu mengambil keputusan lokasi di situ.

Dengan meneliti dan membahas perilaku pelaku bisnis, pengambil keputusan kebijakan daerah akan memperoleh informasi tentang faktor lokasi apa yang semula mempengaruhi keputusan lokasi mereka, dan kemudian dapat memeriksa apakah faktor lokasi itu masih berlaku sampai sekarang. Kalau masih berlaku, langkah berikut adalah membandingkan apakah kebijakan baru itu sesuai dengan faktor lokasi itu. Kalau sesuai, pembahasan tentang kebijakan baru dapat dilanjutkan. Apabila kebijakan pembangunan ini tidak sesuai, maka kebijakan baru harus dimodifikasi atau bahkan harus dibatalkan

tergantung pada paradigma yang dilihat oleh para *stakeholder* (Soepono, 1999:29).

Peran pemerintah daerah dalam mengumpulkan dukungan untuk sebuah agenda pembangunan yang berfokus pada bagaimana berbagai visi tentang masa depan daerah diperebutkan dalam proses kebijakan lokal, dapat dipahami secara bermanfaat sebagai politik budaya dimana makna didefinisikan kemudian yang akan diperjuangkan dalam pembangunan. Maka penggunaan istilah politik budaya pembangunan lokal dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pembuatan makna dan pembuatan tempat terjadi secara bersamaan dalam pengembangan pembangunan demi masa depan ekonomi masyarakat yang lebih baik (McCann, 2002). Perkembangan pembangunan dapat dilihat sebagai aspek utama dari pengembangan diri dan identitas pada masa terhadap individu. Tahap perkembangan pembangunan yang di harapkan pasti tujuan yang berbeda, tetapi sedikit yang diketahui tentang faktor dan mekanisme yang terlibat dalam proses perkembangan (Kunnen & Bosma, 2000).

Semua negara pasti mengalami dan menghadapi masalah pengangguran, Oleh sebab itu tugas pemerintah yang utama adalah mengatasi masalah pengangguran, salah satu cara pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran adalah dengan membangun proyek-proyek strategis serta membangun infrastruktur yang menggunakan banyak tenaga kerja. Keputusannya terserapnya tenaga kerja dapat membantu kinerja pemerintah dalam mengatasi persoalan pengangguran serta masalah proses pembangunan dilevel nasional, Terserapnya tenaga kerja dalam proyek-proyek padat karya akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional.

Menurut (Jogaswara, 2020) terhambatnya proses pembangunan di Indonesia dikarenakan pembangunan sektor ketenagakerjaan di Indonesia masih dengan kasus yang sama pada tantangan berat yakni masalah pengangguran. Angka pengangguran umumnya tergolong tinggi, ditambah juga dengan meningkatnya angka para pencari kerja baru sekitar satu hingga dua juta orang secara berkala dari tahun ke tahun, merupakan masalah yang dihadapi saat ini. Masalah lainnya adalah dominasi sektor informal dalam struktur pasar kerja Indonesia, terlebih keberadaan Omnibus

Law Cipta Lapangan Kerja merupakan sebuah terobosan dan menjadi kebutuhan mendesak untuk memecahkan masalah pengangguran di Indonesia yang sangat memberikan dampak terhadap proses pembangunan nasional.

Urgensi dari penelitian ini adalah mengenai tentang bagaimana pengembangan model pembangunan diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari dimana untuk pembangunan daerah memerlukan kontribusi yang sangat penting untuk pembangunan yang berkelanjutan. Bagaimana model pembangunan itu dapat disesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman serta mengatasi permasalahan yang sangat fleksibel dalam proses pembangunan di Indonesia.

B. LANDASAN TEORITIS

Teori pembangunan merupakan salah satu teori besar yang juga dikenal dengan istilah ideologi developmentalisme. Sesuai namanya teori ini berporos pada sebuah aspek pembangunan, kemudian lebih khususnya pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Gagasan inti teori pembangunan adalah asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan motor penggerak terciptanya kesejahteraan sosial dan progres politik. Kesejahteraan sosial dicapai dibawah naungan sistem kapitalisme. Sedangkan progres politik dicapai dengan diterapkannya sistem demokrasi. Pembangunan melalui kapitalisme akan membawa masyarakat dari tradisional, terbelakang, dan tribal menuju masyarakat yang modern, maju, dan progress. Apabila masyarakat mengalami transformasi menjadi masyarakat yang modern, aspek politik akan bergerak ke arah demokrasi. Dua konsep ini: kapitalisme dan demokrasi adalah poros utama teori pembangunan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok. Adapun tujuan dan fungsi pokok perencanaan pembangunan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar Daerah.

3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Untuk mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan.
5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil.

Pembangunan di negara-negara berkembang secara historis, memulai pembangunan ekonomi modern biasanya dengan tenaga kerja, modal, dan pasar perdagangan yang mendekati tingkat efisiensi (Williamson, 1965). Makna pembangunan secara dinamis, pembangunan merupakan orientasi kegiatan usaha dalam berbagai aspek yang mempengaruhi oleh lingkungan sekitar. Pembangunan dapat menjadi sebuah proses yang berkembang tergantung pada kekuatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang menghendaki adanya pertumbuhan untuk kesejahteraan masyarakat dengan bentuk perubahan atau *growth plus change* di berbagai bidang seperti jasa atau industri, reformasi kelembagaan, perbaikan regulasi serta kerjasama pihak swasta maupun pemerintah secara rasional bagi pengembangan pembangunan nasional.

Pembangunan sebagai proses perubahan yang melibatkan semua elemen masyarakat: ekonomi, sosial-budaya, politik, struktur fisik, dan sistem nilai dan cara hidup masyarakat, buku ini secara komprehensif menyatukan ide-ide tentang pembangunan dan transformasi masyarakat dari berbagai disiplin ilmu. Proses pembangunan dan menganalisis berbagai aspek konsep pembangunan. Ini memberikan wawasan yang kaya tentang karakteristik masyarakat berkembang, teori pembangunan ekonomi, masalah demografis dalam pembangunan, peran pembangunan pertanian dalam transformasi ekonomi, proses urbanisasi dan pengembangan pasar yang terjadi bersamaan, dan aspek pembangunan sosiologis dan politik. (Portes, 1976; Alexander, 1994).

Kemudian Siagian (2000) mengatakan pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian dari pertumbuhan dan perubahan oleh sebuah negara menuju ke era modernisasi sebagai upaya pembinaan bangsa atau *nation building*. Bratakusumah (2005) pembangunan memiliki arti berbeda dari satu orang dengan orang yang lainnya ataupun daerah yang satu sama daerah lainnya,

baik pun ke negara satu dengan negara lainnya sehingga secara umum pembangunan merupakan hasil kesepakatan untuk melakukan proses perubahan pada sebuah peristiwa.

Pembangunan pastinya membutuhkan perencanaan karena kebutuhan pembangunan mempunyai prioritas yang besar melihat besarnya Sumber Daya Manusia yang membutuhkan pembangunan tersebut, demi terwujudnya perkembangan pembangunan, berikut ini unsur-unsur perencanaan pembangunan di antaranya yaitu :

1. Tujuan yang diinginkan
2. Prioritas dan sasaran yang dikehendaki dalam bentuk mewujudkannya
3. Memiliki jangka waktu
4. Masalah-masalah yang akan dihadapi
5. Sumber daya manusia atau modal yang akan diperuntukan
6. Partisipasi masyarakat, organisasi maupun badan pelaksanaanya
7. Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengawasan

Kemudian menurut (Rostow, 1959) menjelaskan bahwasnya sebuah negara dalam proses pembangunan dari dengan kondisi masyarakat tradisional memiliki lima langkah yang perlu diperhatikan yaitu

1. Negara pada kondisi masyarakat yang masih menerapkan tradisional dengan memegang ekonomi pembangunan yang susisten, artinya dimana proses pembangunan dengan melibatkan ikatan persaudaraan yang masih kuat akibat kultur dan budaya yang primitif dan belum mengenal perkembangan teknologi yang ada yang telah dirasakan oleh masyarakat modern.
2. Negara yang kondisinya masyarakat dalam proses pembangunannya dengan mengangakt karakteristik utama masyarakat yang siap landas. Artinya pada langkah ini munculah sebuah keberadaan teknologi dalam penggunaannya yang mengacu pada system perbankan dan investasi yang akan menghasilkan nilai-nilai perubahan pada transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern dalam memperkuat pembangunan dalam sebuah daerah.
3. Selanjutnya Negara memikirkan proses

pembangunan karakteristik pada elemen tradisional tenggelam oleh modernisasi. Lalu munculah urbanisasi terjadi di kota-kota besar, pertanian mengalami komersialisasi, dan industrialisasi berkembang pesat. Grafik pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam proses pembangunan tersebut.

4. Negara yang kondisi masyarakatnya menuju kedewasaan dalam proses pembangunan. Artinya karakteristik utama masyarakat yang menuju dewasa meliputi pertumbuhan ekonomi yang secara umum konsisten meskipun ada fluktuasi pada pembangunan yang akan dilaksanakan.
5. Selanjutnya negara yang kondisi masyarakatnya menuju masyarakat konsumsi (*the age of high mass consumption*). Karakteristik utama masyarakat berada pada peralihan dari produksi barang ke produksi jasa. Masyarakat telah mencukupi kebutuhan dasarnya dan menghabiskan konsumsi untuk jaminan dan kesejahteraan sosial. Hal ini sangat dipertimbangkan dalam peran masyarakat sebagai langkah strategis menuju masyarakat yang konsumsi.

Lalu (Alirasta, 2014) menambahkan perlunya pembangunan yang barum erupakan pengembangan dan modifikasi dari teori pertumbuhan tradisional yang khusus untuk dirancang untuk menjelaskan kenapa equilibrium pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang bisa positif dan bervariasi di berbagai negara dan mengapa pula arus modal cenderung mengalir dari negara-negara miskin ke Negara-negara maju meskipun rasio modal-tenaga kerja masih rendah. Dalam teori modern ini, faktor-faktor produksi yang krusial tidak hanya banyaknya tenaga kerja dan modal, tetapi juga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemajuan teknologi (yang terkandung di dalam barang modal atau mesin), energi, kewirausahaan, bahan baku, dan material. Bahkan, dalam era globalisasi dan perdagangan bebas dunia saat ini, kualitas SDM dan teknologi merupakan dua faktor dalam satu paket yang menjadi penentu utama keberhasilan suatu bangsa dan negara. Selain itu, faktor-faktor lain yang oleh teori modern juga dianggap sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah

ketersediaan dan kondisi infrastruktur, hukum, serta peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, birokrasi, dan dasar tukar internasional.

Masing-masing pendekatan memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri, namun kenyataan akan masih adanya kontroversi, baik itu secara idealogis. Teoritis, maupun empiris. Justru menjadi bidang studi tersebut semakin menantang dan memikat. Ilmu ekonomi pembangunan tidak memiliki paradigma pembangunan yang telah diterima secara universal. Meskipun masih dalam taraf formatif atau pematangan, teori pertumbuhan yang baru juga telah menyodorkan konsep-konsep penting, terutama fokusnya mengenai sumber-sumber pertumbuhan ekonomi endogen, yang memungkinkan kita untuk lebih memahami divergensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang antar Negara-negara maju dan Negara-negara berkembang. Model proses pembangunan telah memodifikasi dan mengembangkan sendiri asumsi-asumsinya sehingga tidak lagi bisa disamakan dengan asumsi-asumsi yang masih dianut oleh teori pertumbuhan tradisional.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), dengan melakukan telaah terhadap sumber-sumber pustaka seperti buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen lainnya baik cetak maupun online yang relevan dengan topik yang sedang dikaji pada penelitian ini. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2014).

Menurut Bogdan & Biklen (1998) studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Surakhmad (1980) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Sementara Yin (2010) memberikan batasan yang lebih bersifat teknis dengan penekanan pada ciri-cirinya.

Ary, Jacobs, & Razavieh (1985) menjelaskan studi kasus hendaknya peneliti berusaha menguji organisasi atau individu secara mendalam. Pada

penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yang berasal dari berbagai macam jurnal bereputasi, buku-buku yang berhubungan dengan model pembangunan nasional dan pembangunan daerah di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

Model Pembangunan Nasional Berorientasi Pertumbuhan

Menurut Chand (1989:474) kunci utama *Growth-Oriented Model* adalah dukungan anggaran di sekitar kerangka akuntansi moneter, di mana stakeholder merinci kewajiban neraca dan aset sektor moneter yang dikonsolidasikan secara tepat identitas akuntansi yang digunakan sama serangkaian kewajiban moneter (permintaan uang) yang ditentukan dengan tepat sesuai dengan jumlah aset domestik dan asing yang sesuai (sumber pasokan uang).

Seperti halnya semua identitas akuntansi, tidak ada implikasi mengenai kausalitas; identitas konsisten dengan sejumlah teori kausal alternatif yang menjelaskan pergerakan dalam besaran moneter. Namun demikian, untuk membawa perubahan yang diinginkan dalam besaran tertentu, seperti posisi aset asing bersih dari sektor moneter, yang diidentifikasi secara dekat dengan neraca pembayaran hasil yang diperlukan untuk memiliki teori kausal yang berhubungan dapat dikendalikan besarnya ke objek pembangunan yang diinginkan. Anggaran memiliki arti penting sebagai sebuah instrumen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan mengatur program prioritas pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah dari (Sentanu, 2015)

Sementara itu pendapat yang berbeda muncul dari Mazzarol & Reboud (2009:337), yang berpendapat bahwa ukuran dari pertumbuhan dan kinerja yang lebih kuat, yang juga mencakup tenaga kerja, omset penjualan, profitabilitas, dan permodalan, dan tujuan yang diinginkan. Namun demikian, temuan ini memiliki implikasi untuk pendidikan *stakeholder* yang menyarankan mereka harus fokus pada pengembangan sistem manajerial untuk membandingkan pembangunan modal dengan praktik terbaik kebijakan. *stakeholder* juga perlu waspada terhadap sebuah perubahan lingkungan, berkomitmen terhadap inovasi dan bersedia untuk mengubah atau mengambil

tindakan jika diperlukan. Namun, mereka juga harus menyadari pentingnya memiliki visi strategis yang jelas untuk usaha mereka dan kebutuhan dalam mengkomunikasikan visi pembangunan *growth-oriented model* yang dimaksud khususnya bagi angkatan kerja. Kemudian Perubahan paradigma pembangunan nasional, dari sentralisasi menjadi desentralisasi, menyebabkan terjadinya perubahan pendekatan pada sistem perencanaan dan penganggaran

Lebih lanjut menurut -----Lingelbach, Vina, & Asel (2005:78) pembangunan di negara-negara berkembang adalah hal penting yang paling banyak dipelajari secara global. Fenomena ekonomi saat ini telah menyoroti beberapa fitur khas yang mungkin dari model pembangunan tetapi telah menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada yang dijawab sehingga memunculkan implikasi kebijakan, adalah sebagai berikut:

- a. Fokus kembali pada pembangunan model baru dan berorientasi pada pertumbuhan yang sebagian besar penelitian spesialis dalam bidang ini berkonsentrasi pada usaha mikro dan bisnis gaya hidup pertumbuhan rendah, namun kurang berkontribusi dalam cara yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang diperlukan untuk mengurangi angka kemiskinan di negara-negara yang tergolong sedang berkembang. Adapun penelitian terbaru sangat merekomendasi bahwa para stakeholder harus lebih berorientasi pada pertumbuhan yang lebih memungkinkan untuk memberikan kontribusi dari kalangan angkatan kerja pada aspek pertumbuhan ekonomi dan menyediakan sumber-sumber baru penting dari pekerjaan yang berkualitas agar lebih baik lagi.
- b. Dinamika penciptaan pembangunan ketika kita mulai mengembangkan potret sektor modal manusia di negara-negara berkembang tertentu, kita belum dapat membentuk gambaran yang jelas tentang dinamika sektor-sektor ini.
- c. Keterkaitan keuangan pribadi dengan pembentukan pembangunan sektor baru. Kita sangat sedikit memahami tentang keuangan pribadi individu saat ini dan yang baru lahir di negara-negara berkembang.

Tingkat tabungan pribadi dan hubungan keuangan antar keluarga tampaknya menjadi bidang penting untuk penelitian empiris, mengingat bahwa akses keuangan terus dikutip sebagai penghalang penting untuk pembentukan sektor baru.

- d. Memvalidasi hasil *global entrepreneurship monitor* (GEM) tentang tampaknya tidak adanya korelasi antara bisnis umum dan kondisi makroekonomi dan peluang pembangunan karena kurangnya korelasi antara lingkungan bisnis umum dan tingkat aktivitas usaha di negara yang dikategorikan oleh GEM sebagai "miskin" perlu divalidasi dan lebih baik dimengerti. Data perlu dianalisis ulang, menggunakan definisi Bank Dunia tentang negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Selain itu, data perlu dianalisis untuk kemungkinan korelasi antara lingkungan bisnis dan kewirausahaan yang sukses, bukan hanya tingkat aktivitas pembangunan secara umum.
- e. Model keberhasilan. Beberapa studi tidak memiliki studi yang ketat yang berfokus pada pengalaman dari negara berkembang. Saat ini, pekerjaan semacam itu terbatas pada beberapa studi kasus. Pada prinsipnya model keberhasilan pembangunan di negara-negara maju kebanyakan memiliki pendekatan politis dan birokrasi yang tidak efisien.

Pembangunan pada dasarnya adalah memegang pertumbuhan yang mengarah pada konsep ekonomi yang memiliki konotasi positif; itu melibatkan penerapan langkah-langkah ekonomi dan teknis tertentu untuk menerapkan sumber daya yang tersedia untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada 1950-an dan 1960-an, pembangunan sebagian besar disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, yang berarti perubahan kuantitatif daripada kualitatif dalam kinerja ekonomi. Akibatnya banyak teori-teori berkenaan pembangunan dirancang untuk mengaktifkan dan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan negara-negara berkembang di sepanjang jalan yang dipetakan oleh industri di barat, dari mengandalkan terutama pada kegiatan pertanian hingga mengandalkan terutama pada produksi dan perdagangan.

Adapun menurut Chaniago (2014:10) dengan berbagai kebijakan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat tajam sejak tahun 2016, menjadi 7,1 persen pada tahun 2017, dan terus meningkat pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 7,5 persen dan 8,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ini, pendapatan perkapita naik dari Rp. 47,8 Juta (USD3.918,3) pada tahun 2015 hingga mencapai Rp. 72,2 Juta (USD 6.018,1) pada tahun 2019. Dari sisi pengeluaran, investasi didorong dan mencapai sekitar 10,4 persen pada tahun 2017, dan 12,1 persen pada tahun 2019. Dorongan kuat dari investasi akan meningkatkan kontribusi ekspor barang dan jasa, serta konsumsi. Ekspor diperkirakan tumbuh 8,8 persen pada tahun 2017, dan mencapai 12,2 persen pada tahun 2019. Konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah tumbuh secara bertahap dan masing-masing mencapai 6,1 persen dan 2,5 persen pada tahun 2019. Dari sisi produksi, industri pengolahan dalam lima tahun diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 7,4 persen per tahun, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu industri pertanian, kehutanan dan perikanan diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 4,5 persen. Seiring dengan pertumbuhan PDB secara keseluruhan, industri tersier juga mengalami kenaikan dengan pertumbuhan tertinggi pada industri informasi dan komunikasi yang mencapai 13,4 persen pada tahun 2019, ditopang oleh membaiknya infrastruktur dan meningkatnya pemakaian alat telekomunikasi.

Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, tingkat kemiskinan diupayakan terus menurun dan mencapai sekitar 7,0-8,0 persen pada akhir tahun 2019, dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,0-5,0 persen pada akhir tahun 2019. Untuk mencapai sasaran tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan ditempuh langkah-langkah konkret untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja yang berkualitas.

Model Pembangunan Kebutuhan Dasar

Menurut (Lund et al., 2013) ada 5 prinsip utama model pembangunan kebutuhan dasar yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya meskipun esensi model ini tidak memiliki indikator yang saling melengkapi dalam model pembangunan kebutuhan dasar. Diantaranya yaitu :

1. **Pembangunan kapasitas** : pembangunan kapasitas adalah merupakan bagian dari kebutuhan dasar dalam pembangunan yang mana kapasitas merupakan sebuah ruang untuk menyikapi model pembangunan yang akan dilaksanakan. Seperti contoh kapasitas pelayanan terpadu, pelayanan terpadu ini sebagai upaya dimana masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara sebagai masyarakat yang taat akan regulasi dan aturan yang ada. Kapasitas pelayanan ini sebagai bentuk pembangunan yang menjadi pondasi baik dari kapasitas pemerintah daerah maupun kapasitas pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan kebutuhan dasar yang memang harus dilaksanakan. Akan tetapi pembangunan kapasitas perlu peran dari masyarakat dalam hal ini partisipasi agar pembangunan kapasitas yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan keinginan semua *stakeholder* yang ada.
2. **Mata pencaharian berkelanjutan** : merupakan bagian dari pembangunan kebutuhan dasar dengan jenis mata pencaharian masyarakat sesuai dengan letak kondisi dan geografis di daerah masing-masing yang dapat dikembangkan sebagai multifungsi pencaharian yang memberikan nilai manfaat pada lingkungannya yang berkelanjutan.
3. **Penelitian dalam pembangunan** : model pembangunan kebutuhan dasar memerlukan sebuah kajian baik dari akademisi maupun praktisi. Hal ini bertujuan agar model pembangunan kebutuhan dasar memiliki landasan dan acuan yang kuat seperti naskah akademik dalam melaksanakan pembangunan kebutuhan dasar yang mencakup berbagai sektor. Penelitian dalam pembangunan merupakan proses yang tak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan, implementasi pembangunan maupun evaluasi pembangunan dalam memperkuat model pembangunan berkebutuhan dasar.
4. **Manajemen dan admistrasi** : model pembangunan kebutuhan dasar yang memainkan fungsi dan perannya seperti

perencanaan pembangunan, pengarahannya dan pengendalian pembangunan serta mengimplementasikan sebuah manajemen dan administrasi secara efisien dan efektif sebagai bentuk pembangunan yang diperlukan kebutuhan dasar. Seperti contoh menjalankan sebuah proyek pembangunan di daerah maupun nasional dengan memperhatikan model pembangunan kebutuhan dasar dari segi manajemen dan administrasi agar proyek yang dikerjakan bisa dikategorikan efisien dan efektif secara fisik dan pelaksanaannya.

5. Kesehatan mental masyarakat : model pembangunan dasar memiliki peran yaitu perlunya kesehatan mental masyarakat ini bertujuan kesiapan masyarakat akan menerima pembangunan yang berkebutuhan dasar, artinya kebutuhan dasar dalam pembangunan ini harus tepat sasaran, hal ini bisa memicu konflik jika tidak adanya persiapan yang baik dalam pembangunan masyarakat. Kesehatan mental yang dimaksud lebih mengarah pada persiapan pemikiran masyarakat yang akan berdampak pada kesehatan individu maupun kelompok akibat pengaruh pembangunan di wilayahnya. Kemudian perlu dengan mempertimbangkan resiko dari sisi positif maupun sisi negatif dalam pelaksanaan pembangunan berkebutuhan dasar.

Proses pembangunan kebutuhan dasar yang memiliki kebutuhan kuat dengan capaian ingin untuk sukses, seharusnya kebutuhan tersebut memiliki kebutuhan yang tinggi untuk berprestasi. Kebutuhan yang tinggi untuk pencapaian menghasilkan tingkat kepuasan yang tinggi ketika orang itu menyelesaikan seperti proyek tepat waktu, menutup penjualan dengan prospek, atau mendorong ide-ide baru dan inovatif.

Proses pembangunan kebutuhan dasar yang memiliki tujuan yang sangat eksplisit untuk dicapai adalah karakteristik yang ideal untuk individu yang dalam mewujudkannya proses pembangunan kebutuhan dasar yang tinggi. Proses pembangunan ini memerlukan seperti umpan balik yang tersedia secara teratur dan mudah dipahami. kemudian dalam prosesnya membutuhkan umpan balik untuk menentukan langkah selanjutnya dalam mengejar

tujuan. Namun, kebutuhan dasar yang tinggi untuk berprestasi dapat menjadi masalah karena tidak diberdayakan secara maksimal.

Model pembangunan kebutuhan dasar masyarakat bisa saja memiliki keunikan dalam penerapan proses pembangunan kebutuhan dasar yang mana secara individualistik kehadiran masyarakat dalam proses pembangunan kebutuhan dasar sebagai penentu kesuksesan pembangunan kebutuhan dasar yang ingin dicapai Negara. Pada model ini negara dapat hadir dalam memberikan bantuan terhadap pelayanan kebutuhan dasar masyarakat berupa subsidi dan bantuan sosial lainnya.

Konkretnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan aspek kebutuhan dasar dapat dicapai dengan memberikan akses bagi penduduk berpenghasilan 40 persen terendah kedalam kegiatan ekonomi produktif dan secara selektif pemberian Kartu Keluarga Sejahtera. Kesempatan yang luas bagi masyarakat kurang mampu untuk berkiprah dalam pembangunan, akan mempercepat penurunan kemiskinan sehingga meningkatkan taraf kehidupan ekonomi keluarga yang berkelanjutan. Berbagai potensi akan dikembangkan sesuai kondisi ekonomi dan wilayah. Peningkatan kapasitas, keterampilan, akses kepada sumber pembiayaan dan pasar, diversifikasi keterampilan, serta perlindungan usaha dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat kepada sumberdaya produktif (-----Chaniago, 2014: 610).

Adapun tujuan dalam program ini menurut -----Chaniago(2014: 610) yaitu:

- a. Terfasilitasinya sebanyak mungkin Rumah Tangga kurang mampu yang memperoleh program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan;
- b. Terbentuknya kelembagaan pendampingan di daerah sebagai media untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan penduduk miskin;
- c. Terbentuknya kemitraan pemerintah di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta / B U M N / B U M D dalam pengembangan kapasitas;
- d. Meningkatkan keterampilan masyarakat miskin dalam kesempatan kerja serta pengembangan wirausaha;
- e. Terbentuknya kelembagaan keuangan yang

- membuka peluang akses masyarakat miskin terhadap modal dan peningkatan aset kepemilikan;
- f. Terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat produktif di kantong-kantong kemiskinan tingkat kecamatan sebagai media untuk pengembangan masyarakat kurang mampu;
 - g. Terbentuknya mekanisme dalam pengembangan keterampilan masyarakat kurang mampu dan penyaluran tenaga kerja dan

Model Pembangunan Masyarakat (*People Centered Model*)

Perubahan dalam masyarakat terjadi di semua bidang yaitu bidang ekonomi, politik, bahasa, kesenian, hiburan, adat dan lain sebagainya. Dalam beberapa abad tertentu, perubahan-perubahan ini terjadi dengan sangat lambat sehingga tidak terasa oleh manusia. Oleh

karenanya, orang selalu berpendapat bahwa waktu tetap tenang dan semua berlangsung seperti biasa, seperti sekarang. Tetapi terdapat juga abad-abad di mana terjadi perubahan-perubahan yang sangat cepat dan mencolok pada semua bidang. Banyak orang yang menjadi tidak tenang dan menolak semua perubahan-perubahan.

Esensi proses pembangunan pada model ini adalah peningkatan kualitas kepesertaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, persamaan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka diperlukan sinergitas pembangunan nasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemahaman penerapan model ini seringkali dipahami sebagai sebuah proses pemberdayaan (Kartono, 2008). Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam lingkungan social dan aktualisasi potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

Tabel 1. Model Pembangunan *People Centered Model*

No	Karakteristik	Indikator
1	Fokus	Pemberdayaan
2	Nilai	Berpusat pada manusia
3	Indikator	Hubungan manusia dengan sumberdaya
4	Peran Pemerintah	Enabler/facilitator
5	Sumber Utama	Kreativitas dan komitmen
6	Kendala	Struktur dan prosedur yang mendukung

Sumber: diolah dalam Kartono, 2016, hal. 1.15.

Dalam perkembangan paradigma pembangunan sebagaimana pada tabel 1 diatas bahwa focus dala model ini adalah pemberdayaan. Tentunya ini berbeda dengan model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan yang berfokus kepada industry, dan model pembangunan kebutuhan dasar/kesejahteraan yang berpusat kepada pelayanan public. Peran pemerintah dalam mendorong pembangunan dengan model pembangunan kebutuhan dasar adalah sebagai penyedia pelayanan (*service provider*) dan *entrepreneur* pada model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Namun dalam model pembangunan berbasis masyarakat peran pemerintah adalah sebagai fasilitator. Oleh karena itu, maka esensi model ini mendorong adanya

keberdayaan dan independensi kepada individu, masyarakat bukan sebagai subyek namun sebagai sebagai actor yang memiliki peran penting dalam proses pembangunan.

(Wardhani, 2009:50) didalam tulisan nya menjelaskan Sekalipun model pembangunan terakhir telah berhasil melontarkan pemikiran-pemikiran baru dan memperkenalkan perlunya reformasi - reformasi prioritas program pembangunan, keduanya ternyata hanya berhasil menawarkan suatu alternatif yang bersifat parsial terhadap model pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan karena kurang perhatian terhadap keterpusatan posisi umat manusia dalam pembangunan yang telah membuat lapisan penduduk miskin tergantung pada pelayanan dan

program-program pembangunan pemerintah.

Hal ini bertolak belakang dengan kondisi saat ini dimana pertumbuhan pembangunan berbasis masyarakat telah di framing dalam revolusi mental sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup manusia pada perkembangan zaman saat ini. Revolusi mental yang diintegrasikan oleh sebuah pembangunan berbasis masyarakat mengubah pola cara hidup dengan cara yang hal tidak biasa pada umumnya. Seperti contoh revolusi mental diindonesia identik dengan sebuah gerakan untuk menguatkan karakter manusia dengan cara yang keras agar manusia tersebut tampil dengan *new people* agar tujuannya ialah membangkitkan jiwa yang baru didalam kehidupannya sehari-hari. Akan tetapi revolusi mental saat ini untuk pengaruhnya terhadap model pembangunan berbasis masyarakat tidak ada dampaknya serta tidak berpengaruh sama kehidupannya baik yang berdampak pada tingkat kesejahteraan maupun tingkat perekonomian suatu wilayah.

Model pembangunan berbasis masyarakat seharusnya bisa dilihat dengan indikator peningkatan kualitas SDM seperti pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kemudian dari sisi *soft skill* manusia dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan siap untuk bersaing sektor ekonomi. Tujuan utama memperkuat model pembangunan berbasis masyarakat adalah membentuk revolusi mental setiap individu mampu akan membangun kemandirian yang tidak tergantung kepada peluang kerja dari pemerintah saja. Kemandirian ini perlu diterapkan agar tingkat kesejahteraan semakin baik. Selain itu dalam menyukseskan model pembangunan ini butuh kesiapan pemerintah untuk menunjang saran dan prasarana baik secara materil dan non materil.

Meskipun selain dari program revolusi mental yang telah dijalankan oleh pemerintah pusat, perlu adanya program-program penunjang yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah agar pembangunan berbasis masyarakat bisa ditingkatkan secara maksimal melalui pemberdayaan masyarakat desa dan masyarakat tertinggal, ini lebih di fokuskan karena proses pembangunan berbasis masyarakat perlu dikotrol dan diawasi secara berkala agar pembangunan berbasis masyarakat bisa terdeteksi dari wilayah diluar perkotaan.

Model pembangunan seperti ini, memberikan peranan warga masyarakat bukan hanya sebagai subyek melainkan lebih-lebih sebagai aktor yang menentukan tujuan-tujuannya sendiri, maenguasi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dan mengarahkan proses-proses yang mempengaruhi hidupnya. Meskipun pembangunan yang berpusat pada manusia, mengakui pentingnya pertumbuhan, namun penampilan dari suatu sistem pertumbuhan terutama tidak diukur berdasarkan nilai pertumbuhan yang dihasilkannya, melainkan lebih pada hubungannya dengan seberapa luas masyarakat terlibat didalamnya dan seberapa tinggi kualitas situasi kerja yang tersedia bagi mereka.

Dalam hubungan itu, salah satu hal yang sangat penting yang membedakan model pembangunan yang berpusat pada manusia dengan model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan/produksi adalah bahwa yang pertama mensubordinasikan kepentingan sistem produksi dibawah kepentingan manusia, sementara yang kedua menempatkan kepentingan manusia dibawah subordinasi kepentingan sistem produksi.

Model Pembangunan Kedaerahan

Proses pembangunan tidak sekadar suatu proses *unilinear* dan bidang saja melainkan bersifat kriteria-kriteria menyangkut multidimensional. Indikator keberhasilan dari proses pembangunan ini tidak cukup hanya dengan ukuran-ukuran yang sifatnya ekonomis. Lebih dari itu hal yang perlu dipahami baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang kelak untuk yang akan mendatang mendatang nantinya lebih dituntut peranannya dalam pembangunan daerah dalam rangka realisasi pelaksanaan otonomi daerah secara lebih luas lagi. Kurang kewaspadaan daerah baik itu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah akan menciptakan implikasi-implikasi yang negatif bagi perkembangan daerah itu sendiri.

Demikian pula egosentrisme yang berlebihan dari daerah membawa konsekuensi-konsekuensi yang serius kemudian hari. Oleh karena bagaimanapun nilai otonomi yang terlalu berat dibandingkan dengan *nation building* dapat memecah belah suatu bangsa satu menjadi beberapa

bangsa. Nilai *nation building* mewujudkan kekuatan *centripetal* atau kekuatan menyatu ke dalam, sedangkan nilai otonomi mrenghancurkan kekuatan sentrifungsional atau kekuatan menyebar keluar (Tjokrowinoto, 1987:93). Permasalahannya adalah bagaimana proses yang terjadi.

Pembangunan dapat memperkokoh *nation building* atau lebih tepat ketahanan nasional. Sudah barang tentu proses pembangunan menimbulkan dampak positif bagi integrasi nasional mempunyai potensi untuk meningkatkan ketahanan nasional. Integrasi berbeda dengan dominasi karena integrasi ditandai oleh interdependensi fungsional antar sub sistem, sedangkan dominasi cenderung menciptakan ketergantungan daripada sub sistem.

Pola pembangunan daerah meskipun tidak harus sama karena sangat tergantung atau ditentukan oleh kondisi fisik dan nonfisik daerah tersebut, tetapi seyogyanya tidak membuat daerah lain terdesak atau hilang eksistensinya. Integrasi pembangunan bagi daerah-daerah ini penting karena integrasi tersebut memiliki 2 karakter sebagai berikut.

1. Menciptakan atau memperkuat berbagai subsistem di dalam masyarakat sehingga tercapai derajat *self-sustaining*.
2. Mempertinggi interaksi antar sub sistem sehingga menaikkan kualitas integrasi nasional (Tjokrowinoto, 1989).

Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan sedemikian rupa akan menciptakan integrasi nasional yang mempunyai kebaikan-kebaikan tertentu, yang pada gilirannya akan memperbesar ketahanan nasional. Hal ini disebabkan berikut ini.

1. Proses yang demikian, masih memberi ruang bagi pemerintah pusat untuk menjalankan fungsi kepemimpinan yang diperlukan guna memobilisasi atau mendorong rakyat dan berbagai sub- sistem untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka *social action*.
2. Proses ini mempunyai daya tanggap (*responsiveness*) yang cukup untuk mengetahui kebutuhan, tuntutan, keluhan masyarakat, mengadakan evaluasi terhadap perubahan aspirasi masyarakat dan mengambil tindakan taktis. Untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan

kebutuhan (*need*) dan aspirasi (*aspiration*) masyarakat tertentu.

3. Proses tersebut tidak semata-mata memaksakan kehendak pusat, tetapi yang lebih penting melipatgandakan *agent of human promotion* yang berarti mengubah rakyat atau subsistem sebelumnya pasif menjadi aktif berpartisipasi dalam pembangunan (Goulet, 1973);
4. Proses demikian, tidak berorientasi pada output semata-mata, tetapi juga memberikan perhatian pada input, khususnya yang berwujud aspirasi dan kepentingan masyarakat dan berbagai sub-sistem yang diartikulasikan dan diagregasikan serta dukungan masyarakat terhadap rencana pembangunan yang dirumuskan. Proses pemasukan atau input yang berasal dari daerah yang *notabene* cenderung diabaikan dapat dimanfaatkan sehingga pemerintah pusat dapat memperoleh informasi yang cukup tepat terkait kebutuhan-kebutuhan dan sumber daya yang ada di daerah.

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan proyek-proyek penunjang daerah. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah mengembangkan seluruh wilayah yang tertinggal di Indonesia menjadi wilayah swasembada melalui tahap ke beberapa desa swadaya dan swakarya dan memperhatikan keserasian pembangunan daerah pedesaan dan daerah perkotaan, imbalanced kewajiban antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antara program sektoral atau regional dengan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia (Sudirwo, 1981 :64).

Model pembangunan daerah ini dapat diartikan sebagai upaya pemerataan wilayah yang dimana selama ini pembangunan di daerah belum maksimal di implementasikan karena banyak pertimbangan yang harus di perhatikan agar pembangunan daerah tersebut memiliki kualitas dan keinginan masyarakat yang tinggi sesuai

dengan kegunaannya. Menurut Riyadi(2000:4) ada tiga indikator keberhasilan pengembangan pembangunan daerah yang dapat dilihat sebagai kesuksesan pembangunan daerah. Indikator pertama adalah produktivitas, yang dapat diukur dari perkembangan kinerja suatu institusi beserta aparatnya. Indikator kedua adalah efisiensi, yang terkait dengan meningkatnya kemampuan teknologi/sistem dan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan. Terakhir adalah partisipasi masyarakat, yang dapat menjamin kesinambungan pelaksanaan suatu program di suatu wilayah. 12. Ketiga indikator keberhasilan tersebut terkait erat dengan faktor-faktor yang menjadi ciri suatu wilayah dan membedakannya dengan wilayah lainnya seperti kondisi politik dan sosial, struktur kelembagaan, komitmen aparat dan masyarakat, dan tingkat kemampuan/pendidikan aparat dan masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan pengembangan suatu wilayah bergantung pula pada kemampuan berkoordinasi, mengakomodasikan dan memfasilitasi semua kepentingan, serta kreativitas yang inovatif untuk terlaksananya pembangunan yang aspiratif dan berkelanjutan.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Bertolak dari apa yang telah dikemukakan pada pembahasan, dapat diusulkan proses perencanaan pembangunan yang memperhatikan beberapa hal yaitu proses perencanaan bersifat multilevel, integrasi dan ketahanan nasional akan lebih dapat dicapai apabila terdapat jaringan perencanaan yang bersifat multilevel yang mengikutsertakan baik birokrasi pemerintah maupun berbagai organisasi masyarakat, seperti lembaga swadaya masyarakat ataupun sektor private dalam proses perencanaan yang mempunyai keseimbangan antara pendekatan *top down* dengan *bottom up* oleh karena bagaimanapun bagi daerah-daerah yang belum memiliki banyak sumber daya manusia yang memadai akan mengalami kesulitan dalam pengelolaannya. Jadi dalam hal ini pemerintah (pusat) tidak boleh memandang daerah semata-mata sebagai *appendage* nya.

Dalam proses pembangunan nasional, telah berkembang beberapa model pembangunan

diantaranya adalah model pembangunan nasional berorientasi pertumbuhan, model pembangunan kebutuhan dasar, model pembangunan masyarakat yang berpusat pada manusia, dan model pembangunan kedaerahan. Model pertama yaitu model pembangunan yang berorientasi kepada pembangunan, sesuai namanya merupakan model pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, akumulasi modal, tenaga kerja dan kemajuan teknologi. Kedua, model pembangunan kebutuhan dasar berorientasi kepada bantuan pemenuhan pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat oleh negara. Ketiga, model pembangunan kedaerahan yang berorientasi kepada peningkatan kapasitas manusia melalui aspek pemberdayaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keempat, model pembangunan kedaerahan yaitu model pembangunan yang berorientasi kepada penguatan daerah dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang dapat memperkuat ketahanan nasional (*nation building*). Pola pembangunan daerah didasarkan kepada proses integrasi antar pemangku kepentingan baik pusat dan daerah melalui penguatan sistem pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan interaksi antar sub-sistem dalam rangka meningkatkan kualitas integrasi secara nasional.

Kemudian Membagi kewenangan kepada daerah. Interdependensi fungsional antara pembangunan perlu dikaitkan dengan program *capacity building*, yang hanya dapat berjalan efektif apabila secara bertahap satuan pemerintah yang lebih rendah diberi wewenang untuk menguasai dan mengelola sumber-sumber dana dan sumber-sumber daya yang ada. Peraturan berupa perundangan mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberi kemungkinan pemerintah daerah membuat dan melaksanakan rencana sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setempat.

Lalu *error learning* bagi daerah didalam proses *capacity building* seyogyanya kepada daerah diberi kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Oleh karena itu peningkatan kapasitas pemerintah daerah hendaknya dilakukan dengan motto, seperti yang dikemukakan oleh David Korten *adalah embracing error, learning with the people and building new knowledge and institutional capacity trough action*. Ada kesempatan untuk suatu proses belajar yang

berurutan dari membuat kesalahan, memperbaiki kesalahan yang telah terjadi pada masa sulit pembangunan sesuai proses *capacity building* tersebut kemudian mengembangkan diri dalam mengatur regulasi serta aturan dalam pengembangan pembangunan yang nantinya akan menjadi nilai dalam proses pembangunan bagi masyarakat rasakan.

Rekomendasi

Rekomendasi dari penelitian ini ada beberapa alternatif untuk pengembangan model pembangunan di negara-negara berkembang yang nantinya memberikan kontribusi yang signifikan diantaranya adalah yang pertama peran masyarakat tradisional ditransmisi menjadi masyarakat modern untuk menunjang produktivitas tenaga kerja untuk perkembangan pembangunan melalui pemberdayaan SDM demi kebutuhan zaman dari waktu ke waktu.

Kemudian yang kedua dalam meningkatkan investasi dalam pertumbuhan berkala yang berdampak pada pembangunan nasional, hal ini perlu ada dorongan kapasitas pemerintah pusat untuk mendorong penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri demi terciptanya pembangunan dari tingkat daerah maupun tingkat nasional untuk menekan angka pengangguran dan menretaskan kemiskinan.

Ketiga yaitu pembangunan sarana infrastruktur di wilayah strategis (3T, tertinggal, terpencil, terdepan) berbasis kebutuhan masyarakat sebagai langkah awal dalam pembangunan daerah demi tercipta iklim keadilan sosial yang akan mendorong perekonomian serta proses pembangunan masyarakat perbatasan dan yang terakhir melakukan inovasi pembangunan secara terstruktur dan masif, hal ini diperlukan agar generasi bangsa memberikan pemikiran dan kemampuannya sebagai bentuk kontribusi pembangunan nasional melalui perencanaan dalam perkembangan pembangunan di bidang teknologi sesuai kebutuhan di era modern yang demokratis.

Kemudian peran pemerintah pusat dalam pembuat kebijakan harus melakukan peningkatan langkah dan strategi dalam pembangunan nasional misalnya dengan memetakan wilayah berupa potensi model pembangunan sebagai bentuk pembuat kebijakan nasional di Indonesia sehingga publik dalam hal ini masyarakat bisa ikut

berpartisipasi dengan baik dalam kontribusi proses pengembangan pembangunan.

REFERENSI

- Alexander, K. C. (1994). *The process of development of societies*. Sage Publications.
- Alirasta, R. (2014). *Teori-teori pembangunan*. Kompasiana: Beyond Blogging.
- Ary, D., Jacobs, L. C., & Razavieh, A. (1985). *Introduction to research in education* (3rd ed.). Holt, Rinehart, and Winston.
- Atmasasmita, R. (2012). Tiga paradigma hukum dalam pembangunan nasional. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3(1), 1-26.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1998). *Quality research for education: An introduction to theory and methods* (3rd ed.). Allyn and Bacon.
- Bratakusumah, D. S. (2005). *Perencanaan pembangunan daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Chand, S. K. (1989). Toward a growth oriented model of financial programming. *World Development*, 17(4), 473-489.
- Chaniago, A. A. (2014). *Buku I Agenda Pembangunan Nasional: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Goulet, D. (1973). The cruel choice: A new concept in the theory of development. In *Center for the Study of Development and Social Change* (Atheneum P, Vol. 197). Atheneum.
- Islam, R., Ghani, A. B. A., Kusuma, B., & Theseira, B. B. (2016). Education and human capital effect on Malaysian economic growth. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(4), 1722-1728.
- Jogaswara, H. (2020). *Pengangguran masih jadi masalah pembangunan di Indonesia*. Media Indonesia.
- Kunnen, E. S., & Bosma, H. A. (2000). Development of meaning making: A dynamic systems approach. *New Ideas in Psychology*, 18(1), 57-2.
- Lingelbach, D., Vina, L. D. La, & Asel, P. (2005). What 's distinctive about growth-oriented entrepreneurship in developing countries? *SSRN Electronic Journal*, June, 1-10.

- Lund, C., Waruguru, M., Kingori, J., Kippen-Wood, S., Breuer, E., Mannarath, S., & Raja, S. (2013). Outcomes of the mental health and development model in rural Kenya: A 2-year prospective cohort intervention study. *International Health*, 5(1), 43-50.
- Mazzarol, T., & Reboud, S. (2009). Strategic planning in growth oriented small firms. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research*, 15(4), 320-345.
- McCann, E. J. (2002). The cultural politics of local economic development: Meaning-making, place-making and the urban policy process. *Geoforum*, 33(3), 385-398.
- Portes, A. (1976). On the sociology of national development: Theories and issues. In *American Journal of Sociology* (Vol. 82, pp. 55-85). The University of Chicago Press.
- Riyadi, D. M. M. (2000). Pembangunan Daerah melalui Pengembangan Wilayah. *Diseminasi Dan Diskusi Program-Program Pengembangan Wilayah Dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Daerah*, 15-16.
- Rostow, W. W. (1959). The stages of economic growth. *The Economic History Review*, 12(1), 1-16.
- Sentanuc, I. G. E. P. S. (2015). Increasing Trust in Local Government Financial Management and Building Integrity: Efforts Reform in Indonesia. *Public Policy and Administration Research*, 5(3), 206-213.
- Siagian, S. P. (2000). *Administrasi pembangunan*. Bumi Aksara.
- Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. (n.d.).
- Soepono, P. (1999). Teori lokasi: Representasi landasan mikro bagi teori pembangunan daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 14(4), 1-32.
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65-94.
- Surakhmad, W. (1980). *Pengantar penelitian ilmiah: dasar, metode dan teknik*. Tarsito.
- Sulasdi, W. N., Ratnawulan, Y., & Afandi, M. N. (2017). Model penguatan korelasi antara sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur permukiman di lingkungan direktorat jenderal cipta karya. *Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 14(1), 266-279
- Tjokrowinoto, M. (1987). *Politik pembangunan : Sebuah analisis konsep, arah, dan strategi*. Tiara Wacana.
- Tjokrowinoto, M. (1989). The programme for the enhancement of the role of women in Indonesia: Comparing decentralized planning and implementation in 2 locations. In *UNCRD case study series on local social development* (2nd ed., Vol. 5). United Nations Digital Library.
- Wardhani, A. C. (2009). Pembangunan yang berpusat pada manusia. *Jurnal Pertumbuhan dan Perkembangan* 2(3), 47-54.
- Williamson, J. G. (1965). Regional inequality and the process of national development : A description of the patterns. *Economic Development and Cultural Change*, 13(4), 1-84.
- World Bank. (2018). *Urbanisasi untuk semua* (Issue September). World Bank.
- Yin, R. K. (2010). *Qualitative research from start to finish*. Guilford Press.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. (Ed.3). Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.